

**IMPLEMENTASI GRANT ASSISTANCE FOR GRASSROOTS HUMAN SECURITY PROJECT (GGP) DALAM MENGATASI ISU KEAMANAN EKONOMI TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG**

Penulis : Naufal Bintang Akbar

naufal.bintang.2015@fisipol.umy.ac.id

Dosen Pembimbing : Sugito, S.IP.,M.Si

**ABSTRAK**

*Setelah UNDP memperkenalkan konsep keamanan manusia pada tahun 1994, pemerintah Jepang pertama kali juga turut serta memperkenalkan konsep tersebut pada tahun 1995 sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Dalam dunia Internasional peran Jepang telah dianggap sebagai kontributor utama untuk pengarusutamaan intelektual dari konsep dan implementasi konsep keamanan manusia. Salah satunya melalui piagam Official Development Assistance (ODA) 2003 yang ditawarkan pemerintah Jepang kepada negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah keamanan manusia. Pada dasarnya, ODA Jepang diberikan melalui tiga jenis, yaitu pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama teknik. Namun penelitian ini hanya berfokus pada bantuan hibah dengan salah satu turunannya yaitu “Grant Assistance for Grassroots Human Security Project” (GGP).*

*Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah kepada 7 proyek yang ada Indonesia dan salah satunya ada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sebagai fokus dalam penelitian ini. Proyek tersebut diawali oleh masalah keamanan ekonomi karena metode industri yang masih bersifat tradisional telah menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakterjaminan pendapatan pada masyarakat pesisir yang memiliki industri ikan asin dan olahan kering lainnya di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Oleh sebab itu, perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan bantuan asing yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang melalui program “Grant Assistance for Grassroots Human Security Project” (GGP). Skema yang ada didalam GGP telah menghasilkan kerjasama antara Kedutaan besar Jepang di Indonesia sebagai pemberi dana kepada proyek usulan Karya Muda Belitung (KMB) yang juga sebagai mitra pelaksana untuk mengimplementasikan bantuan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir*

*dengan penyediaan 10 mesin pengering berkapasitas besar di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.*

**Kata kunci: Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP), keamanan ekonomi, pemerintah Jepang, masyarakat pesisir, kecamatan Sijuk**

## **ABSTRACT**

*After UNDP introduced the concept of human security in 1994, the Japanese government also participated in introducing the concept in 1995 as the foundation of Japan foreign policy. In the international world, the role of Japan has been regarded as the main contributor to intellectual mainstreaming from the concept and implementation of the concept of human security. One of them is through the Official Development Assistance (ODA) charter in 2003 that offered by the Japanese government to developing countries in Addressing human security issues. Basically, Japanese ODA is given through three types, namely YEN loans, grant assistance and technical cooperation. But this research only focuses on grant assistance with one of its derivatives, namely "Grant Assistance for Grassroots Human Security Project" (GGP).*

*In the 2017 budget year, the Japanese Government provided grant assistance to 7 projects in Indonesia and one of them was in Sijuk District, Belitung Regency as the focus of this research. The project was initiated by economic security problems because industrial methods that were still traditional had caused instability and unsecured income in coastal communities that had other salted and dried fish industries in Sijuk District, Belitung Regency. Therefore, the Association of Karya Muda Belitung (KMB) took the initiative to addressing this problem by utilizing foreign assistance offered by the Japanese government through the "Grant Assistance for Grassroots Human Security Project" (GGP) program. The scheme in the GGP has resulted in collaboration between the Japanese Embassy in Indonesia as a funder to the project proposed by Karya Muda Belitung (KMB) which is also an implementing partner to implement assistance through the empowerment of coastal communities by providing 10 large capacity drying machines in Sijuk District, Belitung Regency.*

**Keywords: Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP), economic security, Japanese government, coastal community, Sijuk sub-district**

## 1. Pendahuluan

Saat ini isu keamanan dalam kajian Hubungan Internasional sudah semakin berkembang yang awalnya didominasi oleh kaum tradisional dengan menyatakan bahwa isu keamanan hanya terbatas pada hubungan perang dan ancaman nuklir saja. Sehingga tidak relevan lagi untuk berfokus pada negara dan teritorialnya serta penggunaan *hard power* (militer) sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas karena isu keamanan sudah meluas ke sektor individu dan telah masuk ke aspek politik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. konsep keamanan tradisional yang dilahirkan oleh pemikiran kaum realis kini sudah mulai usang dan belum bisa memberikan jaminan keamanan bagi bangsa suatu negara (Singh & Nunes, 2016). Pada tahun 1994, UNDP dalam *Human Development Report 1994* mengkategorikan isu keamanan manusia kedalam tujuh bidang yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas dan politik (United Nation Development Programme, 1994).

Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu bidang isu keamanan manusia yaitu isu keamanan ekonomi yang menjadi akar masalah dalam kajian penelitian. Menurut UNDP keamanan ekonomi merupakan kondisi yang membutuhkan penghasilan dasar tetap terjamin atau stabil, biasanya dari kegiatan produktif dan pekerjaan yang menguntungkan, atau dalam upaya terakhir dari beberapa jaring pengaman yang dibiayai publik. Tapi hanya sekitar seperempat penduduk dunia yang pada saat ini aman secara ekonomi dalam pengertian ini. Sementara masalah keamanan ekonomi di negara berkembang lebih mengkhawatirkan dibanding negara maju (United Nation Development Programme, 1994).

Pada tahun 2015, JICA Research Institute mengeluarkan penelitian mengenai elemen keamanan manusia mana yang dianggap sebagai prioritas atau yang paling penting di Indonesia sebagai negara berkembang. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa keamanan ekonomi (kebebasan dari keinginan) adalah masalah keamanan manusia yang paling penting di Indonesia seperti kesenjangan pendapatan, ketimpangan pendapatan, atau distribusi kesejahteraan / sumber daya yang tidak merata. Ketika masyarakat mendapatkan akses yang aman dalam meningkatkan perekonomiannya maka akan tercipta stabilitas keamanan negara dan sebaliknya apabila masyarakat mendapatkan kesulitan atau ancaman untuk mengakses sumber ekonomi mereka maka stabilitas keamanan negara akan menurun. Masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kesejahteraan telah mendapat perhatian khusus karena kemiskinan dipandang sebagai sumber yang dapat mengarah pada jenis ancaman lainnya, yaitu terorisme, radikalisme, atau ekstremisme. Mirip dengan kemiskinan, perubahan iklim juga dianggap

membawa potensi untuk mengarah pada jenis ancaman lainnya, seperti kerawanan pangan, bencana alam, dan cuaca ekstrem (JICA, 2015, pp. 17-19).

Tidak lama setelah UNDP memperkenalkan konsep keamanan manusia pada tahun 1994, pemerintah Jepang pertama kali juga turut serta memperkenalkan keamanan manusia melalui pidato Perdana Menteri Murayama di PBB pada Oktober 1995. Konsep "keamanan manusia" yang diperkenalkan oleh UNDP di adopsi oleh pemerintah Jepang sebagai pilar diplomasi negaranya, dan hari ini Jepang telah menjadi pendukung keamanan manusia di komunitas internasional. Selain itu, pemerintah Jepang telah mengembangkan kebijakan konkret tentang keamanan manusia di dalam program *Official Development Assistance* (ODA) negaranya. Jepang menganggap konsep ini sebagai landasan teoritis yang mengaitkan keamanan dengan bantuan pembangunan dan sarana upaya pembangunan perdamaian di wilayah konflik (Nasukawa, 2017, pp. 73-74).

Pada dasarnya ODA Jepang diberikan melalui tiga jenis bantuan, yaitu pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama teknik. Namun fokus bantuan dalam penelitian ini yaitu pada bantuan hibah saja yang salah satu turunannya diperuntukkan bagi masyarakat di tingkat akar rumput. Secara resmi bantuan hibah tersebut bernama "*Grant Assistance for Grassroots Human Security Project*" (GGP). Program GGP pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1989 dan sudah tersebar ke berbagai negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan keuangan. Dalam pemberian skema GGP, pemerintah Jepang mengambil dimensi tambahan "Keamanan Manusia" untuk mengatasi kebutuhan yang muncul dari negara-negara berkembang atau negara-negara pasca konflik dalam mempromosikan proses pembangunan perdamaian. Landasan pemberian bantuan ini muncul dari proyek pembangunan yang diusulkan oleh entitas seperti lembaga non profit dan otoritas pemerintah daerah di negara penerima. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besarnya di negara-negara penerima memiliki skema kerjasama dengan entitas tersebut guna mengumpulkan informasi dan menganalisisnya ke dalam bentuk data valid agar bantuan yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan di negara penerima.

GGP mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1997 sebagai bentuk dukungan Jepang kepada Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat itu. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil, namun Indonesia dituntut harus bisa mempertahankan kestabilan tersebut baik jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah Jepang melalui Kedubesnya di Indonesia dengan lembaga non profit lokal di

Indonesia diharapkan dapat berkontribusi untuk mengatasi berbagai isu keamanan manusia pada masyarakat di tingkat akar rumput.

Pada tahun anggaran 2017 Jepang mengeluarkan bantuan hibah akar rumput sebesar Rp 6,353 miliar untuk 7 proyek yang tersebar di Indonesia dengan latar belakang isu yang berbeda. Namun penelitian ini hanya berfokus pada salah satu proyek yang bernama *“The Project for Supporting Fishermen in Belitung Island, Bangka Belitung Province.”* Secara spesifik, lokasi sasaran dalam proyek ini diperuntukkan bagi 6 Desa pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

Proyek ini merupakan usulan dari perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) yang berinisiatif untuk bekerjasama dengan Kedubes Jepang di Indonesia melalui bantuan hibah yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang dalam skema *“Grant Assistance for Grassroots Human Security Project”* (GGP). Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir yang memiliki industri ikan asin dan olahan kering lainnya di Kecamatan Sijuk. Hal ini dikarenakan metode industri yang masih bersifat tradisional dengan ketergantungan terhadap cuaca yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produk serta nilai jualnya di pasaran sehingga berdampak pada pendapatan yang tidak stabil bagi masyarakat pesisir tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merumuskan pertanyaan penelitian menjadi *“Bagaimana implementasi Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP) dalam mengatasi isu kemanan ekonomi terhadap masyarakat pesisir di Kecamatan sijuk ?”*

## **Kerangka Berpikir**

### **konsep bantuan luar negeri**

Dalam buku *“The Political Economy of International Relations”* oleh Robert Gilpin yang berargumen bahwa bantuan luar negeri merupakan dana yang diberikan kepada negara berkembang atau miskin secara ekonomi dari negara yang relatif kaya atau perekonomiannya sudah maju (Gilpin & Gilpin, 1987) . Namun untuk pengertian yang lebih luas, K.J Holsti menjelaskan bantuan luar negeri adalah transfer dana, barang atau konsultan teknis dari negara pemberi kepada negara penerima sebagai sarana kebijakan luar negeri yang telah dilangsungkan selama berabad-abad dalam hubungan internasional (Holsti, 1987). Selain itu Holsti juga memaparkan empat macam bantuan luar negeri berdasarkan jenisnya, yaitu :

#### 1) Bantuan Teknik

- 2) Bantuan militer
- 3) Grants/hibah dan program impor komoditi
- 4) Pinjaman untuk pembangunan

Lebih lanjut Holsti dalam (Perwita & Yani, 2005) menjelaskan bahwa salah satu bentuk bantuan luar negeri berupa hibah yang terdapat beberapa parameter dalam pemberiannya, parameter tersebut digolongkan menjadi:

#### 1) Hibah Menurut Skema Dan Bentuknya

##### a) *Cash Grant*

Hibah ini berbentuk tunai yang terbatas untuk negara-negara miskin.

##### b) *Grants assistance for project*

Hibah dalam bentuk pemberian dana yang dapat dikatakan sama dengan pinjaman luar negeri namun digunakan untuk membiayai suatu proyek pengadaan barang dan jasa (Project Assistance) hanya saja dana dalam skema ini tidak harus dikembalikan.

##### c) *Technical assistance or technical cooperation*

Hibah ini berupa penyediaan tenaga ahli atau konsultan dari negara donor untuk membantu proyek pembangunan di negara penerima.

##### d) *Grants for humanitarian assistance*

Pemberian hibah ini dilakukan bila terjadi keadaan bantuan darurat yang mengancam.

#### 2) Hibah menurut peruntukannya dan penyalurannya:

##### a) Hibah untuk pemerintah (government to government)

Pemerintah negara pendonor memberikan hibah kepada pemerintah negara penerima untuk proyek-proyek pemerintah.

##### b) Hibah untuk non-pemerintah (government to private)

Pemerintah negara pendonor memberikan hibah kepada lembaga-lembaga non pemerintah (LSM, NGO, CBO dan asosisasi non profit lainnya).

Dalam hal ini pemerintah Jepang memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk hibah pendanaan dengan skema Grant Assitance for Project yang disalurkan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia kepada sektor private (Karya Muda Belitung) sebagai mitra lokal untuk mengimplementasikan proyek usulannya dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

## **2. Pembahasan**

### **a. *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP)***

Sebagai negara maju, Jepang memiliki program kerjasama ekonomi melalui Bantuan Pembangunan Resmi / *Official Development Assistance* (ODA) untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ada 3 jenis ODA yang diberikan, yaitu kerjasama Teknik, pinjaman YEN dan bantuan hibah. Namun jenis ODA dalam esai ini adalah bantuan hibah untuk masyarakat akar rumput / *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP)*. GGP merupakan bantuan keuangan untuk proyek pembangunan yang dirancang oleh berbagai lembaga non profit dan otoritas pemerintah daerah (Menteri Luar Negeri Jepang, 2014).

Skema GGP mengambil dimensi tambahan “keamanan manusia” untuk mengatasi kebutuhan yang muncul dari negara-negara berkembang atau negara-negara pasca konflik dalam mempromosikan proses pembangunan perdamaian. Perkembangan dari program ODA dengan munculnya skema GGP juga telah memungkinkan diversifikasi terhadap aplikasinya dalam mengatasi kebutuhan yang muncul di daerah yang membutuhkan bantuan pembangunan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005, p. i)

### **b. GGP di Belitung**

Pada tahun fiskal 2017 pemerintah Jepang, ada 7 GGP di Indonesia yang lolos seleksi (Kedubes Jepang di Indonesia, 2018). Namun penelitian ini hanya fokus pada salah satu proyek yang terjadi Belitung. Proyek ini merupakan usulan dari Perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) untuk masalah keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

Kecamatan Sijuk terletak di sebelah barat laut pulau Belitung yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pesisir dan merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Belitung (BPS Kabupaten Belitung, 2018, p. 28). Disamping penjualan ikan dalam bentuk segar, biasanya masyarakat pesisir menjualnya dalam bentuk dikeringkan atau diasinkan seperti ikan asin, kerupuk, terasi dan lain-lain. Sehingga dengan adanya produk olahan yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir seperti ini tentunya dapat menjadi peluang industri yang sangat potensial bagi daerah.

Namun untuk mencapai itu semua tidaklah mudah karena masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk harus dihadapkan dengan beberapa masalah yang dapat mengancam kegiatan

perekonomian mereka. Lokasi yang terpencil dan akses transportasi cukup sulit mengakibatkan daerah Sijuk kurang tersentuh akan informasi mengenai teknologi (iptek) sehingga pengelolaan perikanan di daerah ini masih dilakukan secara tradisional dan kualitas produk yang dihasilkan cenderung tidak seragam. Oleh karena itu, keadaan tersebut berdampak pada nilai jual produk yang rendah dipasaran. Metode industri yang masih bersifat tradisional menyebabkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan cenderung tidak seragam sehingga nilai jual menjadi rendah dipasaran. Metodenya masih mengandalkan sinar matahari dan membutuhkan waktu kering 2-4 hari itupun jika tidak terkendala cuaca mengingat curah hujan di Belitung cukup tinggi. Bahkan ada satu desa yang pernah rugi 1 miliar pada tahun 2017 akibat curah hujan yang panjang mengganggu produksi mereka. Selain itu, metode penjemuran di area terbuka yang berbatasan langsung dengan tanah rawan akan bakteri akibat kontaminasi pasir, debu dan tanah. Selebihnya masalah lain yaitu ketika *demand* produk dipasaran tinggi namun kapasitas produsen dalam mengolah masih terbatas sehingga *supply* produk menjadi rendah. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi teknologi tepat guna dalam industri ikan asin dan olahan lainnya guna mengeringkan produk secara baik dan efisien agar kebutuhan konsumen akan kualitas dan kuantitas produk dapat terpenuhi serta penghasilan produsen bisa stabil bahkan meningkat (KMB, 2017, pp. 2-4).

Dengan kata lain isu yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk dapat digolongkan sebagai isu keamanan ekonomi yang mengancam kesejahteraan sosial ekonomi mereka. Akhirnya pada tahun 2016, sebuah lembaga non profit lokal bernama perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) berinisiatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan skema bantuan hibah untuk akar rumput yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia setiap tahunnya. KMB adalah sebuah perkumpulan yang berisikan anak-anak muda potensial dengan kepedulian tinggi untuk mengabdikan terhadap daerah. Aktivitas yang dilakukan oleh KMB dapat dikategorikan dalam "Development NGO" karena usahanya dalam mendorong kedubes Jepang untuk mendanai rancangan proyek yang mereka ajukan melalui skema bantuan hibah *grassroots*. KMB melakukan pembangunan secara fisik maupun non fisik untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat pesisir dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi olahan ikan mereka sehingga ada alternatif lain untuk berproduksi disamping bergantung pada sinar matahari.

Sebelumnya Karya Muda Belitung melakukan penelitian dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat di desa-desa sasaran yang merupakan calon penerima bantuan. Kemudian berkoordinasi dengan aparat desa, pemerintah kecamatan Sijuk dan pemerintah daerah



Belitung agar proyek yang akan mereka ajukan bisa tergambarkan dan mendapat persetujuan oleh para stake holder setempat. Setelah itu barulah Karya Muda Belitung mengirimkan formulir aplikasi atau proposal pengajuan proyek GGP kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia pada tahun 2016. Kemudian, pada tahun anggaran 2017 pemerintah Jepang, proyek yang di ajukan oleh Karya Muda Belitung dinyatakan lolos untuk tahap seleksi proposal (Suryandaru, 2018).<sup>1</sup>

Selanjutnya pada tahun 2017 sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia mengirimkan perwakilannya, Mr. Tomoya Seki untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang menjadi proyek sasaran di Kecamatan Sijuk. Perwakilan dari Kedubes Jepang datang dan berkunjung langsung ke desa-desa yang menjadi sasaran proyek dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dan kelayakan seperti yang dituliskan dalam proposal pengajuan proyek sebelumnya. Selain melihat kondisi dilapangan, perwakilan tersebut mendatangi para nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta stakeholder setempat (kepala desa, sekretaris camat Sijuk dan Bupati Belitung) untuk memastikan proyek tersebut benar-benar layak mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah Jepang sehingga apa yang ditulis oleh Karya Muda Belitung dalam proposal bukanlah rekayasa belaka. Jadi pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan hibahnya untuk proyek akar rumput sangat detail sekali (Suryandaru, 2018).

Ketika perwakilan Kedubes Jepang mengumpulkan data dan fakta di lapangan secara detail, mereka menemukan potensi yang sangat besar di Kecamatan Sijuk. Disamping potensi perikanan sangat melimpah, potensi lain yang dimiliki setiap desa sasaran cukup bervariasi baik untuk produk perikanan maupun non perikanan yang cara produksinya juga sama-sama dikeringkan. Jadi konsep awal dalam proposal GGP yang diajukan oleh Karya Muda Belitung mengalami penambahan dari Kedubes Jepang sehingga dana yang diberikan melebihi rancangan awal dengan tujuan untuk kebermanfaatan yang lebih besar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Karya Muda Belitung kepada peneliti yang menyatakan bahwa:

“Kita awalnya mengajukan dana sekitar Rp. 695.400.000,- pada tahun 2016, namun pada saat perwakilan Kedubes site visit ke lapangan pada tahun 2017 yang awalnya kita ngajuin dikit, tiba-tiba ditambahin mereka dananya karena proyek ini sangat menarik katanya. Tapi proyek ini kalau bisa tidak hanya untuk ikan asin mengingat potensi di Sijuk sangat banyak. Akhirnya konsep awal di proposal sedikit kita rombak dengan dasar keputusan dari Kedubes Jepang

---

<sup>1</sup> Suryandaru, Ketua Perkumpulan Karya Muda Belitung, *Wawancara*, Tanjung Pandan, 22 Desember 2018

setelah visit lapangan karena potensi di setiap desa sasaran bermacam-macam ada yang produk olahan kering kerupuk, kemplang, terasi dan lain-lain bahkan non perikanan sekalipun juga bisa seperti produk olahan dari hasil pertanian dan perkebunan yang cara produksinya dikeringkan.” (Suryandaru, 2018)

Akhirnya pada April 2018, proyek yang diajukan oleh Karya Muda Belitung mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Jepang dengan ditandatanganinya Nota Kerjasama antara Kedutaan Besar Jepang oleh Duta Besar Jepang, Mr. Masafumi Ishii dengan Karya Muda Belitung yang diwakili oleh Ketua Umum, Suryandaru yang bertempat di kantor Kedutaan Besar Jepang Jakarta. Nama proyek yang disahkan tersebut adalah ***“The Project for Supporting Fishermen in Belitung Island, Bangka Belitung Province”***. Pada saat itu ada 7 proyek bantuan hibah akar rumput untuk keamanan manusia yang di pilih oleh Pemerintah Jepang untuk tahun anggaran 2017 (tahun anggaran Jepang di mulai pada bulan April hingga ahir Maret di tahun berikutnya) termasuk proyek di Belitung salah satunya. Tentunya hal ini merupakan sejarah baru bagi provinsi Kepulauan Bangka-Belitung karena ini adalah GGP pertama di provinsi tersebut (Suhendar, 2018).

Karya Muda Belitung mendapatkan hibah kuangan untuk proyek usulan mereka sebesar Rp 717,000,000,- untuk mengatasi masalah keamanan ekonomi pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Perlu diketahui bahwa dari total 10 desa yang ada di Kecamatan Sijuk hanya 6 desa saja yang menjadi sasaran proyek (Batu Itam, Terong, Tanjung Binga, Keciput, Sijuk dan Sungai Padang) dikarenakan secara geografis desa-desa ini berada di tepi laut yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut baik pantai maupun tebing karangnya dan potensi hasil lautnya juga melimpah sehingga proyek hibah ini sangat sesuai diterapkan pada desa-desa tersebut dan desa Tanjung Binga juga menjadi prioritas dalam proyek ini (Suryandaru, 2018). Selain itu, 80% dari total 1.700 keluarga yang menetap di desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga disebut sebagai desa nelayan. Bahkan desa ini juga dikenal sebagai salah satu sentra ikan asin terbesar di Indonesia dan kualitas ikan asin mereka juga telah sampai ke mancanegara melalui ekspor dari pengepul di Jakarta (Kompas, 2018). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Karya Muda Belitung (Suryandaru, 2018) bahwa:

“Desa sasaran yang dipilih dalam proyek ini adalah desa yang berada di wilayah pesisir karena memiliki potensi ekonomi perikanan yang cukup besar.”

Kecamatan Sijuk terletak di sebelah barat laut pulau Belitung yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pesisir dan merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Belitung (BPS Kabupaten Belitung, 2018, p. 28). Disamping penjualan ikan dalam bentuk segar, biasanya masyarakat pesisir menjualnya dalam bentuk dikeringkan atau diasinkan seperti ikan asin, kerupuk, terasi dan lain-lain sehingga menjadi peluang industri yang sangat potensial bagi daerah.

Menurut perwakilan Kedubes Jepang yang datang ke Belitung dalam acara serah terima bantuan hibah pada 1 Oktober 2018, menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang membuat proyek dari Karya Muda Belitung bisa lolos dari seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. *Pertama*, proyek yang diajukan oleh KMB memiliki potensi dampak keberlanjutan yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk. *Kedua*, *track record* yang dimiliki oleh Karya Muda Belitung sebagai lembaga penerima hibah sangat baik. *Ketiga*, pembangunan di Indonesia selama ini hanya terpusat di pulau Jawa yang notabenehnya sudah cukup besar sehingga diluar pulau Jawa masih banyak yang pembangunannya masih minim dan masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, selain itu ekonomi di daerah-daerah luar Jawa juga masih belum stabil. Oleh karena itulah pemerintah Jepang memprioritaskan daerah-daerah diluar Jawa termasuk Belitung untuk disentuh pembangunannya melalui bantuan hibah akar rumput (Yoshida & Onue, 2018).<sup>2</sup>

Selain itu ada yang unik atau pembeda pada proyek di Belitung dibanding 6 proyek lainnya yang dipilih oleh Kedubes Jepang. *Pertama*, dari semua proyek hibah tersebut yang satu-satunya berkategori maritim hanya ada di Belitung, kebanyakan proyek lainnya adalah dibidang Pendidikan seperti perbaikan dan pembangunan gedung sekolah serta fasilitasnya dimana itu sudah sangat umum sekali. *Kedua*, pemerintah Jepang memberikan catatan bagus kepada proyek dari Karya Muda Belitung karena tidak hanya memberikan hibah mesin namun juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi atau pemberdayaan masyarakat sehingga proyek ini dapat memberikan *multiplayer effect* bagi masyarakat. *Ketiga*, yang melaksanakan proyek ini adalah anak-anak muda potensial dengan visi dan misi pengabdian terhadap daerah yang dibawah naungan Perkumpulan Karya Muda Belitung sedangkan penerima hibah lainnya adalah yayasan, pesantren dan ormas keagamaan (Suryandaru, 2018).

---

<sup>2</sup> Kazuho Yoshida dan Yoko Onue, perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Wawancara*, Tanjung Pandan, 2 Oktober 2018

c. **Implementasi *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP)* di kecamatan sijuk**



Sumber: Penulis mengumpulkan dari beberapa sumber yang ada

***Pengadaan asset material***

Setelah kontrak kerjasama ditanda tangani oleh Kedubes Jepang dan Karya Muda Belitung, barulah dilakukan serah terima bantuan hibah berupa dana sebesar Rp 717,000,000,- (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Karya Muda Belitung untuk pengadaan 10 mesin pengering makanan (Food Drying Machine) bagi desa-desa yang menjadi sasaran. Namun kerjasamanya tidak sampai disitu, setelah pemberian dana, Kedubes Jepang akan terus mengawasi pelaksanaan proyek di Belitung agar sesuai target dan koridor aturan yang berlaku dalam kontrak kerjasama (MoU). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan Kedubes Jepang kepada penulis bahwa:

“Setelah kontrak kerjasama antara Kedubes Jepang dan KMB dilakukan dengan pemberian bantuan dana kepada KMB untuk pengadaan mesin pengering (Food Drying Machine) bagi desa-desa yang dituju, kerjasamanya tidak sampai disitu, setelah pemberian dana kami akan terus mengawasi pelaksanaan proyek di Belitung agar sesuai target dalam kontrak kerjasama.” (Yoshida & Onue, 2018)

Bantuan keuangan sebesar Rp 717,000,000 yang telah diberikan oleh pemerintah Jepang, digunakan untuk penyediaan asset material berupa 10 buah mesin pengering makanan berkapasitas besar. Namun dana tersebut hanya dipergunakan untuk penyediaan dan penyaluran mesin pengering saja sementara biaya perjalanan Karya Muda Belitung dalam mengimplementasikan proyek di setiap desa harus ditanggung oleh pihak Karya Muda Belitung itu sendiri. Kedubes Jepang menawarkan tiga vendor mesin kepada Karya Muda

Belitung untuk dinilai dan dipilih berdasarkan kualitas, harga dan spesifikasinya. Lalu Karya Muda Belitung memilih untuk melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk bisa membuat dan menilai kelayakan materi akhirnya dibuatlah mesin pengering yang bertenaga listrik dan gas (Suryandaru, 2018).

Setelah itu, mesin pengering disalurkan ke tempat-tempat strategis di desa-desa sasaran. Dari total 10 desa yang ada di Kecamatan Sijuk, hanya 6 desa yang menjadi sasaran proyek (Batu Itam, Terong, Tanjung Binga, Keciput, Sijuk dan Sungai Padang) dikarenakan 6 desa tersebut merupakan desa pesisir yang memiliki hasil laut melimpah (Suryandaru, 2018). Lalu mesin pengering akan menjadi asset bagi setiap desa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau kelompok masyarakat pemanfaat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membantu mengoperasikan dan merawatnya (Suryandaru, 2018). Cara kerja mesin ini sangat sederhana yaitu produk olahan yang masih mentah cukup dimasukkan ke dalam mesin sesuai dengan kebutuhan waktu pengeringan.

Ada 2 kelebihan dari penggunaan mesin pengering ini sebagai alternatif pengeringan produk olahan dibanding menggunakan panas sinar matahari. *Pertama* waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan produk olahan akan lebih cepat yaitu 3-4 jam saja sedangkan cara tradisional dengan memanfaatkan panas matahari membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari, itu pun jika tidak terkendala hujan mengingat curah hujan di pulau Belitung cukup tinggi, sehingga metode pengeringan menggunakan mesin pengering bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kuantitas produk. *Kedua*, produk yang dikeringkan dalam mesin pengering yang tertutup akan lebih bersih karena resiko terkena kontaminasi fisik (pasir, debu dan air hujan) akan lebih terminimalisir sehingga kualitas produk akan lebih bagus.

### ***Pemberdayaan***

Setelah mesin disalurkan ke tempat-tempat strategis yang ada pada 6 desa sasaran, Karya Muda Belitung mulai melaksanakan lanjutan dari skema GGP dari pemerintah Jepang yang mengharuskan Karya Muda Belitung untuk membuat program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir berupa kelas aplikatif di lingkungan produksi agar bantuan yang diberikan bisa berjalan efektif, berkelanjutan serta memberikan edukasi kepada mereka dalam merancang, mengerjakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan yang sudah diberikan.

Menurut pernyataan pengawas proyek dari KMB, metode pemberdayaan yang dilakukan oleh mereka dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

“*Pertama* yang telah kita lakukan adalah pendekatan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat tersebut adalah kepala desa yang menguasai satu wilayah desa. *kedua* itu adalah kita membentuk sebuah pola dari KMB sendiri pola ini kemarin salah satu bentuk polanya adalah KMB itu membentuk penanggung jawab di setiap masing-masing desa yang bertugas untuk memfollow up penggunaan mesin. *Ketiga*, sosialisasi fungsi dan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat yang berpotensi menggunakan mesin untuk belajar bagaimana caranya mengoperasikannya dengan benar agar mendapatkan keuntungan yang lebih optimum.”<sup>3</sup> (Arief, 2019)

Dari pernyataan diatas, dapat diuraikan secara rinci tentang tahapan implementasi bantuan hibah yang dilakukan oleh KMB kepada masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk dalam rangka memberdayakan ekonomi mereka, yaitu:

1. Interaksi dengan pemerintah Desa setempat

KMB melakukan pendekatan kepada setiap kepala desa yang desanya menjadi sasaran proyek dan pendekatan tersebut meliputi presentasi proyek, pembentukan nota kesepahaman kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) dan arahan strategis. Hal ini dilakukan mengingat peran mereka yang cukup strategis sebagai pemangku kebijakan dan yang paling tahu dengan kondisi desa sasaran tersebut. Sehingga memudahkan KMB untuk mengimplementasikan proyek kepada masyarakat. Kepala desa memberikan titik lokasi yang strategis untuk menempatkan mesin pengering dan melakukan penunjukan kelompok masyarakat mana saja yang bisa mengelola mesin ini dengan baik tujuannya agar implementasi bantuan bisa lebih efektif dan penggunaan sumber daya juga lebih efisien, adapun kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah Kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pemanfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Pembentukan pola

KMB melakukan sosialisasi langsung kepada kelompok masyarakat yang sudah ditunjuk mengenai fungsi dan manfaat mesin pengering bagi kegiatan industri olahan mereka. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang awalnya mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat melakukan industri dengan cara-cara tradisional kini bisa mendapatkan alternatif lain untuk

---

<sup>3</sup> Arief Kurnia, Pengawas Proyek dari Karya Muda Belitung, *Wawancara*, Tanjung Pandan, 13 Januari 2018

memajukan industri mereka. Dalam tahap awal implementasi, KMB membentuk pola pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat terkait tata cara pengelolaan mesin.

Pola yang dibentuk oleh KMB yaitu dengan membentuk dua struktur penanggung jawab untuk setiap desa. *Pertama*, penanggung jawab dari KMB untuk memberikan kelas aplikatif kepada setiap kelompok masyarakat pemanfaat mesin pengering di 6 desa sasaran. *Kedua*, penanggung jawab dari masyarakat desa untuk mengelola dan bertanggungjawab atas keberlangsungan bantuan yang sudah diberikan. Tujuan pembentukan ini dilakukan agar penanggung jawab dari KMB dapat berkoordinasi dengan penanggung jawab dari desa untuk memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Jadi, sistem pengelolaan bantuan mesin ini sebenarnya dilakukan berdasarkan asas gotong royong didalam masyarakat.

### 3. Eksekusi rencana awal

Ada tiga strategi yang digunakan KMB untuk mengeksekusi rencana awal dalam memberdayakan masyarakat akar rumput di 6 desa sasaran melalui pemanfaatan mesin pengering, yaitu:

#### 3.1 Pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat pesisir di enam desa sasaran yang memiliki industri ikan asin dan olahan lainnya

Dalam hal ini Karya Muda Belitung bekerjasama dengan pemerintah desa setempat, secara teknis kegiatan ini dilakukan oleh tim penanggung jawab desa dari KMB yang mengundang setiap perwakilan kelompok usaha untuk diberikan sosialisasi dan workshop mengenai bantuan hibah mesin pengering yang diadakan selama tiga bulan setelah bantuan datang. Sosialisasi dan workshop tersebut meliputi :

- a. fungsi dan manfaat mesin pengering bagi kegiatan industri ikan asin dan olahan lainnya.
- b. tata cara pengoperasian, pengelolaan dan perawatan mesin dengan baik dan benar
- c. jenis produk yang cocok dan tata cara mengolahnya dalam penggunaan mesin pengering

#### 3.2 Pembuatan mekanisme pemakaian yang mengandalkan asas gotong royong dalam masyarakat meliputi:

- a. Sistem antrian bagi masyarakat yang ingin menggunakan mesin

- b. Penerapan peraturan mengenai sumber pemasukan untuk tiap unit mesin pengering yang diperbolehkan yaitu iuran jasa pengguna yang sesuai dengan kesepakatan bersama, kotak sukarela/tips bila mendapatkan keuntungan besar dari penjualan produk dan pihak luar yang ingin berdonasi.
- c. Sumber pemasukan untuk setiap mesin ini dibuat agar setiap asset memiliki kas cadangan untuk biaya operasional seperti pembayaran listrik dan pembelian gas tabung serta biaya perbaikan mesin apabila terjadi kerusakan terhadap mesin pengering sehingga bantuan yang sudah diberikan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk kegiatan usaha yang lebih produktif.

3.3 Pembinaan kelompok usaha pemanfaat bantuan mesin meliputi: akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, partisipatif dalam kepemimpinan, transparan dalam pengelolaan keuangan, dan mengedukasi produsen agar mendapat pasar yang luas.

#### 4. Tanggung jawab KMB

Menurut pengawas proyek dari KMB menyatakan bahwa:

“...jika ada kerusakan pada mesin kita mendatangkan tim teknisi untuk memperbaiki mesin dimana tim teknisi ini ketika mereka memperbaiki mesin itu, masyarakat kita ikut sertakan agar masyarakat memahami cara kerja dari mesin ini bukan secara operasional saja tapi melainkan apabila ada kesalahan di sini yang di perbaikinya apa.” (Arief, 2019)

Artinya selama kontrak kerjasama dengan desa masih berlangsung, KMB terus bertanggung jawab untuk memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan secara teknis. KMB mendatangkan teknisi lokal maupun dari LIPI untuk memperbaiki mesin yang mengalami kerusakan. Selain itu masyarakat juga di ikut sertakan agar tidak hanya memahami cara kerja mesin secara operasional saja melainkan dapat memperbaikinya bila terjadi kerusakan sehingga melalui skema pemberdayaan seperti ini masyarakat bisa mandiri dalam mengelola bantuan yang sudah diberikan.

Berdasarkan konsep pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam (Bhinadi, 2017), intinya tahap implementasi *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP)* yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu : *Pertama*, dengan adanya proyek bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk masyarakat pesisir di Belitung, Kedubes Jepang di Indonesia bekerjasama dengan Karya Muda Belitung untuk membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan bantuan mesin pengering (food drying machine)



untuk memproduksi ikan asin dan olahan lainnya. *Kedua*, program tersebut mengikutsertakan masyarakat melalui pendampingan, perencanaan dan pembentukan kelas aplikatif di lingkungan produksi agar bantuan yang diberikan bisa efektif serta memberikan kemampuan dan pengalaman mereka dalam merancang, mengerjakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan yang sudah diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan diri dan ekonomi. *Ketiga*, program yang dibuat akan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat agar pelaksanaannya bisa lebih efektif dan penggunaan sumber daya juga lebih efisien, adapun kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah Kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pemanfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### **d. Dampak**

Sebenarnya hasil yang diperoleh dari setiap desa sangat beragam sehingga ukuran berhasil proyek tidak bisa difokuskan pada satu jenis produk saja karena potensi sumber daya yang dimilikinya juga sangat beragam. *Pertama* Desa Batu Itam, selain memiliki hasil laut yang melimpah namun potensi terbesarnya adalah hasil pertanian, oleh sebab itu pemanfaatan mesin pengering dikelolah oleh petani dan kelompok UMKM untuk sektor pertanian dalam menghasilkan produk olahan berupa buah kering dan lada putih. *Kedua* Desa Terong dan Desa Keciput, penggunaan mesin lebih kepada produk dari hasil laut seperti kemplang dan sebagainya dimana pemanfaatan mesin banyak dipakai oleh kelompok UMKM. *Ketiga* Desa Tanjung Binga, desa ini mendapatkan predikat sebagai salah satu sentra ikan asin terbesar di Indonesia sehingga pengguna mesin pengering di desa ini kebanyakan untuk produk ikan asin dan produk olahan lainnya yang di manfaatkan oleh nelayan ikan asin dan kelompok UMKM. *Keempat* Desa Sijuk dan Sungai Padang, potensi terbesar di kedua desa ini adalah terasi, tapi untuk Desa Sijuk bukan cuman terasi melainkan ada produk seperti mie kering dan lain-lain sebagainya, pemanfaat mesin di kedua desa ini adalah nelayan dan kelompok UMKM (Arief, 2019).

Menurut (Arief, 2019) selaku pengawas proyek dari KMB yang menyatakan bahwa ada tiga dampak nyata setelah Karya muda Belitung melaukan kerjasama ekonomi dengan Kedubes Jepang melalui skema GGP, yaitu :

- 1) para pelaku usaha memiliki alternatif lain untuk melakukan industri yang lebih modern tanpa terkendala cuaca yaitu mengeringkan produk menggunakan teknologi tepat guna berupa mesin pengering sehingga kegiatan produksi mereka bisa lebih efektif dan efisien. Tentunya cara seperti ini merupakan inovasi yang sangat futuristik di bidang

industri ikan asin dan produk olahan lainnya mengingat kegiatan industri seperti ini biasanya dilakukan menggunakan cara tradisional yaitu dengan bergantung pada panas matahari saja itupun bila tidak terkendala musim hujan.

- 2) Dengan adanya hibah mesin pengering, kualitas produk dari hasil pengeringan menggunakan mesin jauh lebih bersih bila dibandingkan dengan pengeringan secara tradisional di area terbuka karena bisa meminimalisir kontaminasi fisik (pasir, debu dan tanah) yang berpotensi menimbulkan bakteri. Kemudian bila cuaca sedang tidak stabil biasanya akan menyebabkan pengeringan menjadi tertunda sehingga proses produksi tidak optimal dan oleh sebab itulah akan timbul bakteri yang bisa merusak produk. Selain itu, metode pengeringan menggunakan mesin pengering dapat mempercepat proses pengeringan yaitu sekitar 3-4 jam saja sedangkan metode pengeringan tradisional membutuhkan waktu produksi yang lama (2-3 hari) (Nila, 2019). Sehingga dengan percepatan proses produksi seperti ini, para pelaku usaha bisa menambah kuantitas produk dalam memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi. Biasanya jumlah produksi ikan asin sendiri rata-rata 20 ton/bulan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar daerah.
- 3) Ketika kualitas dan kuantitas produk mengalami peningkatan, maka nelayan ikan asin dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapatkan pemasukan yang stabil dari hasil penjualan produk di pasar. Intinya mendapatkan akses mudah ke sumber ekonomi yang sangat potensial. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendapatan yang layak dan tidak sama seperti kondisi sebelumnya sehingga terhindar dari masalah keamanan ekonomi yang bisa mengancam kesejahteraan mereka.

## References

- Arief. (2019, Januari 13). implementation and results of GGP in the target area. (Naufal, Interviewer) Tanjung Pandan.
- Aryandi, D. (2018, Oktober 4). *Jepang Hibahkan Bantuan 10 Mesin Pengering Ikan Asin di Kecamatan Sijuk*. Retrieved Januari 12, 2019, from Bangka pos: <http://bangka.tribunnews.com/2018/10/04/jepang-hibahkan-bantuan-10-mesin-pengering-ikan-asin-di-kecamatan-sijuk>
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPS Kabupaten Belitung. (2018). *Kecamatan Sijuk dalam Angka 2018*. Tanjung Pandan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Retrieved 11, 2019
- Gilpin, R., & Gilpin, J. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton University Press.
- Holsti, K. (1987). *International Politics (terj)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- JICA. (2015). *Perception on Human Security: Indonesian View*. Tokyo: JICA Research Institute. Retrieved Februari 1, 2019, from [https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/perception\\_on\\_human\\_security\\_indonesian\\_view.html](https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/perception_on_human_security_indonesian_view.html)
- JICA. (2018). *Simposium Kerjasama Pembangunan Indonesia-Jepang "Membangun Masa Depan dengan Landasan Kepercayaan"*. Jakarta: Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office. Retrieved Januari 10, 2019, from [https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/c8h0vm000001pwe4-att/press180514\\_ina.pdf](https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/c8h0vm000001pwe4-att/press180514_ina.pdf)
- Kedubes Jepang di Indonesia. (2018, Maret 21). *Pelaksanaan Acara Penandatanganan Kontrak Bantuan Hibah Grassroots untuk Keamanan Manusia Tahun Anggaran 2017*. Retrieved 11, 2019, from Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: [https://www.id.emb-japan.go.jp/news18\\_04.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/news18_04.html)
- KMB. (2017). *Application Form for Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Indonesian*. Tanjungpandan: Karya Muda Belitung.
- Kompas. (2018, Maret 18). *Tanjung Binga: Eksportir Ikan Terbesar di Belitung*. Retrieved Januari 25, 2019, from Kompas TV: <https://negerilaskarpelangi.com/2017/03/23/tanjung-binga-eksportir-ikan-terbesar-di-belitung/>
- Menteri Luar Negeri Jepang. (2014). *Bantuan Hibah Grassroots Untuk Kemanusiaan*. Retrieved November 30, 2018, from Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia: <https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/application%20form/Grassroot%20Brochure%20B%20Indonesia.pdf>

- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2005). *Evaluation of Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP Scheme)*. Retrieved November 30, 2018, from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/evaluation/FY2005/text-pdf/gghsp.pdf>
- Nasukawa, T. (2017). Human Security in Japanese Foreign Policy : A Challenge to Peacebuilding.
- Nila. (2019, Januari 3). impact of assistance. (Naufal, Interviewer) Tanjung Pandan.
- OHCHR. (2018). *Pamphlet No. 13 of the UN Guide for Minorities*. Retrieved November 23, 2018, from OHCHR: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities13en.pdf>
- Perwita, A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Singh, N. K., & Nunes, W. (2016). Nontraditional Security: Redefining State-centric Outlook. *Jadavpur Journal of International Relations*, 1.
- Suhendar, D. (2018, Maret 22). *Komunitas Muda Belitung Dapat Hibah dari Kedubes Jepang Untuk Indonesia*. Retrieved Desember 11, 2018, from Pos Belitung: <http://belitung.tribunnews.com/2018/03/22/komunitas-muda-belitung-dapat-hibah-dari-kedubes-jepang-untuk-indonesia>
- Suryandaru. (2018, Desember 22). The implementation of the collaboration between KMB and Japanese Embassy. (Naufal, Interviewer) Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka-Belitung, Indonesia.
- Terappe. (2019, Januari 3). GGP and Salted Fish Industry Problems. (Naufal, Interviewer) Sijuk.
- United Nation Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- Yoshida, K., & Onue, Y. (2018, Oktober 2). GGP in Belitung. (Naufal, Interviewer) Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.